

Analisis Daya Saing Wilayah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat

Gholib Tamam Fauzi

¹ Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No.1 Bulaksumur, 55281, Yogyakarta, Indonesia

² Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gambir, 10110, Jakarta, Indonesia

Email correspondence: fauzycs@gmail.com

ABSTRACT

The existence of regional autonomy allows local governments to have space to develop their own regions according to their potential. This begins with conducting an in-depth study of the sectors that will be built and at the same time become development priorities in a region. This research was conducted with the aim of identifying and analyzing sectors that are the basis and non-base of prospective economics which are a reflection of the competitiveness of the regions in West Java Province, evaluating the performance of these sectors as well as identifying the problems faced until finally being able to formulate applicable policy recommendations. The research method used is a combined method, namely a descriptive quantitative method using the Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ) and Klassen Typology methods and a qualitative method using literature studies taken during the 2018-2022 period from several related agencies. Based on the calculations that have been carried out, there are four sectors that are the basis of the economy using LQ, namely the processing industry; wholesale and retail trade, car and motorcycle repair; transportation and warehousing; and other sectors. These sectors are the sectors that are the mainstay of economic growth in West Java. There are 7 sectors that are considered prospective to use DLQ, namely the agriculture, forestry, and fisheries sector; processing industry; water supply, waste management, waste and recycling; accommodation and food and beverage provision; information and communication; real estate; and educational services. Based on Klassen's typology, 7 sectors that have competitiveness include the processing industry sector and the water supply, waste management, waste and recycling sector; the agriculture, forestry, and fisheries sector; accommodation and food and beverage provision; information and communication; real estate; and educational services. Of the seven sectors, each has different constraints and problems. In order to optimize existing competitiveness, it is important to align the planning and development of prospective sectors so that they are in line with national development planning; implementation of programs and activities through collaboration and synergy with other stakeholders through the preparation and formulation of quality regulations (comprehensive and not ego-sectoral), implementing good governance and implementing incentive and disincentive systems that are relevant to the objectives and directions of the policies to be implemented; and the implementation of Continuous Monitoring and Periodic Evaluation in an integrated manner in order to strengthen the management control system and enable improvements that are more responsive to development dynamics.

Keywords:

economic base; competitiveness; non-economic basis; development; growth

ABSTRAK

Adanya otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengembangkan wilayahnya sendiri sesuai potensi yang ada. Hal tersebut diawali dengan melakukan kajian yang mendalam terkait sektor-sektor yang akan dibangun sekaligus menjadi prioritas pembangunan di suatu wilayah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor yang menjadi basis dan non basis ekonomi prospektif yang merupakan cerminan daya saing wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat, melakukan evaluasi kinerja sektor-sektor tersebut sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi hingga akhirnya dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Metode penelitian yang dilakukan ialah dengan metode gabungan yaitu metode kuantitatif deskriptif menggunakan metode *Location Quotient (LQ)*, *Dynamic Location Quotient (DLQ)* dan Tipologi Klassen serta metode kualitatif menggunakan studi kepustakaan yang diambil selama periode 2018-2022 dari beberapa instansi terkait. Berdasarkan kalkulasi yang telah dilakukan, terdapat empat sektor yang menjadi basis ekonomi menggunakan LQ yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; serta sektor lainnya. Sektor tersebut merupakan sektor yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Terdapat 7 sektor yang tergolong prospektif menggunakan DLQ yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estat; serta jasa pendidikan. Berdasarkan tipologi Klassen, 7 sektor yang memiliki daya saing antara lain sektor industri pengolahan serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estat; serta jasa pendidikan. Dari ketujuh sektor tersebut, masing-masing memiliki kendala dan permasalahan yang berbeda-beda. Dalam rangka mengoptimalkan daya saing yang ada, menjadi penting untuk melakukan penyelarasan perencanaan dan pengembangan sektor yang prospektif agar selaras dengan perencanaan pembangunan nasional; implementasi program dan kegiatan melalui kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan yang lainnya melalui penyusunan dan perumusan regulasi yang berkualitas (bersifat komprehensif dan tidak egosektoral), mengimplementasikan tata kelola yang baik serta penerapan sistem insentif dan disinsentif yang relevan atas tujuan dan arah kebijakan yang akan diterapkan; serta penerapan *Continuous Monitoring* dan *Periodic Evaluation* secara terintegrasi dalam rangka memperkuat sistem kontrol manajemen dan memungkinkan perbaikan yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan.

Kata Kunci:

basis ekonomi; daya saing; non basis ekonomi; pembangunan; pertumbuhan

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diberikan ruang dalam rangka membangun dan mengembangkan wilayah administratifnya berdasarkan kapasitas dan potensi yang ada. Adanya otonomi daerah juga berkontribusi terhadap pengurangan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat serta dapat memicu tumbuhnya berbagai macam inovasi pembangunan yang ada di daerah.

Sebagai perangkat pemerintah daerah, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari delapan belas (18) kabupaten dan sembilan (9) kota dimana masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik wilayah yang berbeda. Perbedaan karakteristik tersebut akan mempengaruhi strategi maupun kebijakan pembangunan yang diambil oleh masing-masing wilayah. Dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, penentuan prioritas pembangunan memiliki peran yang penting dalam menentukan arah pembangunan suatu wilayah. Penentuan prioritas tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi basis dan non basis yang nantinya akan mempengaruhi daya saing wilayah tersebut. Identifikasi dan analisis sektor-sektor ekonomi basis dan non basis tidak hanya digunakan dalam rangka penentuan prioritas pembangunan namun dapat juga digunakan sebagai alat bantu analisis dan evaluasi capaian daya saing wilayah Jawa Barat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022. Evaluasi tersebut berguna untuk mengetahui perkembangan capaian daya saing dalam waktu tersebut serta dijadikan sebagai bahan referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada periode 2024 - 2029.

Dalam melakukan evaluasi tersebut, teori yang dapat digunakan ialah basis ekonomi regional. Basis ekonomi regional dapat digunakan untuk menilai aktivitas ekspor daerah, sehingga berfungsi untuk memproyeksikan pertumbuhan tersebut dan pengaruhnya terhadap sektor lain (Soepono, 2001). Pendekatan yang dapat dilakukan ialah dengan Location Quotient, Dynamic Location Quotient dan Tipologi Klassen. Analisis LQ digunakan untuk mengetahui kontribusi suatu daerah (supplier atau importer) atas sektor ekonomi di daerah tersebut (Schaffer, 2010). Metode DLQ merupakan pengembangan dari LQ dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu (Nugroho, 2010). Sedangkan hasil analisis Tipologi Klassen dapat menggambarkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah (Kurniati, 2020). Setelah sektor-sektor usaha yang ada dilakukan pemetaan, kemudian dibutuhkan evaluasi hasil kinerja pembangunan pada sektor tersebut sekaligus mengidentifikasi permasalahan maupun kendala yang dihadapi.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan teori yang digunakan, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sektor-sektor mana saja yang menjadi basis ekonomi prospektif dan non basis ekonomi prospektif (pemetaan sektor-sektor daya saing) pada wilayah Jawa Barat pada tahun 2018-2022 serta melakukan evaluasi kinerja

sektor-sektor tersebut sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi hingga akhirnya dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Pertanyaan yang relevan dalam penelitian ini dapat dituliskan pada poin-poin sebagai berikut:

- Sektor-sektor mana saja yang menjadi sektor basis dan non basis prospektif di wilayah Jawa Barat selama tahun 2018 -2022?
- Bagaimana evaluasi kinerja pembangunan dan identifikasi permasalahan yang dihadapi pada sektor basis dan non basis prospektif tersebut?
- Bagaimana rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan sektor yang memiliki daya saing dan identifikasi masalah yang telah dilakukan?

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Terdapat beberapa keunggulan menggunakan metode campuran yaitu menggabungkan kekuatan kedua pendekatan baik penggunaan data numerik dan pemahaman mendalam terhadap konteks (Creswell, 2014), mengatasi kelemahan pada masing-masing metode (Tashakkori dan Teddlie, 2010), serta memberikan penguatan teori maupun praktik (Creswell dan Plano, 2018). Metode kuantitatif yang digunakan ialah metode kuantitatif deskriptif melalui pengumpulan data sekunder dan publikasi yang kredibel dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Kementerian PPN/Bappenas serta publikasi lain yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan Location Quotient, Dynamic Location Quotient dan Tipologi Klassen. Analisis LQ digunakan sebagai salah satu indikator dalam menentukan sektor unggulan (Basuki & Mujiraharjo, 2017). Berikut merupakan formulasi perhitungan LQ:

$$LQ = \frac{\frac{(X_{ij})}{(RV_j)}}{\frac{(X_i)}{(RV)}} \quad (1)$$

Keterangan :

LQ : koefisien LQ sektor i di wilayah j

X_{ij} : PDRB sektor I di wilayah j

X_i : PDRB sektor I di level atas wilayah j

RV_j : total PDRB wilayah j

RV : total PDRB di level atas wilayah j

Berdasarkan formula di atas, nilai LQ menunjukkan daya saing sektor lapangan usaha di sebuah wilayah. Jika LQ memiliki nilai sama dengan 1 berarti tingkat spesialisasi sektor i di daerah j sama dengan sektor yang sama dalam wilayah setingkat lebih tinggi dari wilayah j. Nilai LQ lebih dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan karena tingkat spesialisasi sektor i di daerah j lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah setingkat lebih tinggi dari wilayah j. Sedangkan nilai LQ kurang dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan bukan sektor unggulan karena tingkat spesialisasi sektor i di daerah j lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah setingkat lebih tinggi dari wilayah j. Periodisasi waktu

dalam perhitungan LQ dilakukan secara tahunan secara terus-menerus untuk mengetahui daya saing tahunan maupun untuk mengetahui perkembangan atau perubahan sektor unggulan yang terjadi dengan berbasis pada data empiris.

Selain menggunakan analisis LQ, juga dilakukan analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) yang merupakan pengembangan dari LQ dengan mempertimbangkan faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu (Nugroho, 2010). DLQ memperhitungkan laju pertumbuhan ekonomi suatu sektor tertentu maupun keseluruhan perekonomian selama periode tertentu. Hasil analisis DLQ menunjukkan potensi suatu sektor untuk menjadi basis ekonomi di masa depan. Berikut merupakan formulasi perhitungan DLQ :

$$DLQ = \frac{\frac{(1 + g_{ij})}{(1 + g_j)}}{\frac{(1 + g_{ip})}{(1 + g_p)}} \quad (2)$$

Keterangan :

DLQ : koefisien DLQ sektor i di wilayah j

g_{ij} : rata-rata pertumbuhan PDRB sektor I di wilayah j

g_j : rata-rata pertumbuhan total PDRB wilayah j

g_{ip} : rata-rata pertumbuhan PDRB sektor I di wilayah p

g_p : rata-rata pertumbuhan total PDRB di wilayah p

Berdasarkan formula di atas, nilai DLQ menunjukkan daya saing sektor lapangan usaha yang prospektif di sebuah wilayah pada rentang periode tertentu (Yuwono, 1999). Jika DLQ memiliki nilai sama dengan 1 menunjukkan bahwa proporsi laju pertumbuhan sektor i di daerah j sama dengan proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama dalam wilayah setingkat lebih tinggi dari wilayah j. Nilai DLQ lebih dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor prospektif karena memiliki laju pertumbuhan sektor i di daerah j lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah setingkat lebih tinggi dari wilayah j. Sedangkan nilai DLQ kurang dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan bukan sektor prospektif karena memiliki laju pertumbuhan sektor i di daerah j lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah setingkat lebih tinggi dari wilayah j. Periodisasi dalam penghitungan DLQ menggunakan rentang waktu tertentu yang lebih lama dibanding LQ. Dalam penelitian ini, rentang waktu yang digunakan ialah selama 5 tahun yaitu 2018-2022 dengan mempertimbangkan ketersediaan data baik pada level provinsi maupun level nasional.

Kedua perhitungan di atas kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengelompokkan masing-masing aktivitas ekonomi ke dalam bagan Tipologi Klassen. Dalam tipologi ini terdiri dari 4 (empat) kuadran (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2019). Pertama, kuadran I yang disebut sektor basis (leading sector) sebagai yang memuat sektor basis dan prospektif ($LQ > 1$, $DLQ > 1$). Kedua, kuadran II yang disebut sebagai sektor potensial (promising sector) yang memuat sektor nonbasis namun prospektif ($LQ < 1$, $DLQ > 1$). Ketiga, kuadran III yang disebut sebagai sektor relatif tertinggal (lagging sector) yang memuat sektor basis namun non prospektif ($LQ > 1$, $DLQ < 1$). Keempat, kuadran IV yang disebut sebagai sektor stagnan

atau terbelakang (declining sector) yang memuat sektor nonbasis dan nonprospektif ($LQ < 1$, $DLO < 1$). Dalam analisis lebih lanjut, poin pembahasan akan berfokus pada sektor-sektor lapangan usaha yang berada pada kuadran I dan kuadran II yaitu sektor basis dan sektor potensial yang menunjukkan daya saing wilayah di Jawa Barat.

Selain menggunakan metode kuantitatif, metode kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui studi kepustakaan atau studi literatur. Studi kepustakaan yang dilakukan menggunakan dokumen yang berasal dari publikasi maupun laporan dihimpun dari beberapa instansi terkait. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan dalam rangka membantu dalam mengidentifikasi permasalahan pada sektor basis dan non basis prospektif yang diusulkan untuk dikembangkan.

III. HASIL DAN DISKUSI

a. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ dilakukan pada periode tahun 2018 – 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Sektor Basis Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

No.	Sektor Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	Non Basis Ekonomi
2	Pertambangan dan Penggalian	0,24	0,23	0,22	0,22	0,20	Non Basis Ekonomi
3	Industri Pengolahan	2,06	2,07	2,05	2,06	2,10	Basis Ekonomi
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,37	0,35	0,34	0,36	0,35	Non Basis Ekonomi
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,99	0,95	1,01	1,06	1,05	Non Basis Ekonomi
6	Konstruksi	0,84	0,84	0,82	0,85	0,83	Non Basis Ekonomi
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,16	1,19	1,14	1,13	1,11	Basis Ekonomi
8	Transportasi dan Pergudangan	1,14	1,13	1,28	1,23	1,14	Basis Ekonomi
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,89	0,90	0,95	0,92	0,91	Non Basis Ekonomi
10	Informasi dan Komunikasi	0,80	0,80	0,97	0,97	0,96	Non Basis Ekonomi
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,63	0,60	0,60	0,62	0,60	Non Basis Ekonomi
12	Real Estat	0,43	0,45	0,45	0,49	0,50	Non Basis Ekonomi
13	Jasa Perusahaan	0,25	0,24	0,21	0,23	0,24	Non Basis Ekonomi
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,58	0,58	0,54	0,53	0,51	Non Basis Ekonomi
15	Jasa Pendidikan	0,92	0,91	0,95	0,95	0,97	Non Basis Ekonomi
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,72	0,61	0,59	0,61	Non Basis Ekonomi
17	Jasa Lainnya	0,22	1,18	1,20	1,19	1,19	Basis Ekonomi

Sumber : Diolah Penulis dari Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel di atas, terdapat 4 (empat) sektor basis ekonomi yang mendominasi perekonomian di Jawa Barat pada rentang tahun 2018 – 2022 antara lain sektor industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; serta jasa lainnya. Hal tersebut didukung oleh kondisi Jawa Barat yang memiliki berbagai jenis industri mulai dari tekstil, otomotif, elektronik hingga makanan dan minuman. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki sejumlah kawasan industri terbesar di Indonesia seperti Kawasan Industri di Jababeka, Kawasan Industri MM2100 serta Kawasan Industri Bekasi dan Karawang. Melihat kondisi tersebut dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, kontribusi ekspor, serta penanaman investasi, kebijakan pemerintah dalam bentuk intervensi guna mendukung pertumbuhan ekonomi maka diperlukan kebijakan dalam konteks peningkatan daya saing industri mulai dari pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pemberian kemudahan berusaha melalui sistem insentif yang diberikan. Adanya infrastruktur pendukung seperti jalan juga perlu menjadi perhatian mengingat subsektor tersebut mendukung pengembangan industri melalui jaringan distribusi yang terkoneksi antarwilayah.

b. Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis DLQ dilakukan pada periode tahun 2018 – 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Sektor Prospektif Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

No.	Sektor Lapangan Usaha	2018-2022	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,01	Prospektif
2	Pertambangan dan Penggalian	0,87	Non Prospektif
3	Industri Pengolahan	1,02	Prospektif
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,95	Non Prospektif
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,05	Prospektif
6	Konstruksi	0,99	Non Prospektif
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,97	Non Prospektif
8	Transportasi dan Pergudangan	0,98	Non Prospektif
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02	Prospektif
10	Informasi dan Komunikasi	1,17	Prospektif
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,96	Non Prospektif
12	Real Estat	1,14	Prospektif
13	Jasa Perusahaan	0,98	Non Prospektif
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,88	Non Prospektif
15	Jasa Pendidikan	1,05	Prospektif
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	Non Prospektif
17	Jasa Lainnya	0,98	Non Prospektif

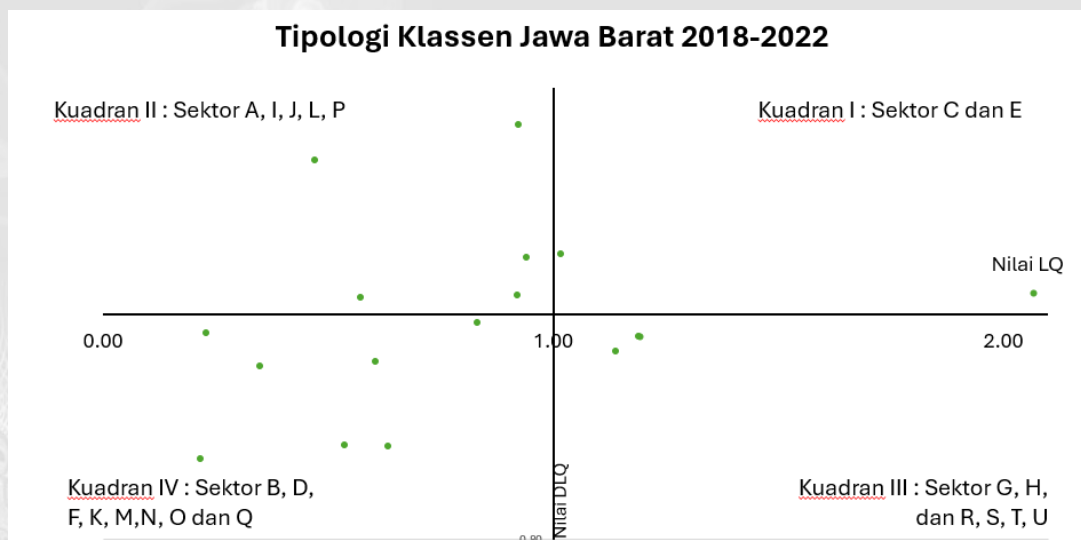
Sumber : Diolah Penulis dari Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel di atas, terdapat 7 (tujuh) sektor prospektif yang mendominasi perekonomian di Jawa Barat pada rentang tahun 2018 – 2022

antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estat; serta jasa pendidikan. Banyaknya sektor prospektif yang dimiliki Jawa Barat menunjukkan bahwa masih banyak sektor yang potensial untuk dikembangkan. Hal tersebut bisa dijadikan oleh pemerintah sebagai landasan dalam menyusun dan merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan ke depan.

c. Analisis Tipologi Klassen

Berdasarkan pemetaan tipologi Klassen yang dilakukan dengan menggunakan data LQ dan DLQ Jawa Barat periode 2018-2022 diketahui bahwa sektor-sektor lapangan usaha terbagi dalam 4 (empat) kuadran. Pada kuadran I (sektor basis), sektor yang tergolong dalam kategori basis dan prospektif adalah sektor industri pengolahan serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Pada kuadran II (sektor potensial), sektor yang tergolong dalam kategori nonbasis namun prospektif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi real estat; serta jasa pendidikan. Pada kuadran III (sektor relatif tertinggal), sektor yang tergolong dalam kategori basis namun tidak prospektif antara lain sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya. Pada kuadran IV (sektor stagnan atau terbelakang), sektor yang tergolong dalam kategori nonbasis dan nonprospektif ialah pertambangan dan penggalan; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Secara lebih lengkap dan rinci, pemetaan dan kuadran sektor pembangunan dimaksud dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 6. Tipologi Klassen Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022
Sumber: Diolah Penulis dari Badan Pusat Statistik

Keterangan:

Sektor A : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Sektor B : Pertambangan dan Penggalan

Sektor C	: Industri Pengolahan
Sektor D	: Pengadaan Listrik dan Gas
Sektor E	: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Sektor F	: Konstruksi
Sektor G	: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Sektor H	: Transportasi dan Pergudangan
Sektor I	: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Sektor J	: Informasi dan Komunikasi
Sektor K	: Jasa Keuangan dan Asuransi
Sektor L	: Real Estat
Sektor M, N	: Jasa Perusahaan
Sektor O	: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Sektor P	: Jasa Pendidikan
Sektor Q	: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Sektor R,S,T,U	: Jasa Lainnya

Dari pemetaan di atas, pemerintah baik pada level pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat berfokus pada pengembangan sektor pembangunan pada kuadran I dan kuadran II. Terdapat 6 (enam) sektor yang berada dalam kedua kuadran tersebut antara lain sektor industri pengolahan serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estat; serta jasa pendidikan.

d. Permasalahan dalam 7 Sektor Usaha Fokus Pembangunan

Terdapat 7 sektor sesuai hasil dari analisis daya saing menggunakan Tipologi Klassen. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; pertanian, kehutanan dan perikanan; penyediaan makan dan minum; informasi dan komunikasi; real estat; serta jasa pendidikan. Dalam bagian ini akan dibahas lebih dalam mengenai identifikasi masalah pada masing-masing sektor sesuai dengan hasil kinerja dari publikasi beberapa instansi terkait.

- Sektor industri pengolahan
Kinerja sektor ini di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai realisasi laju pertumbuhan sektor industri yaitu 4,74% lebih tinggi dibandingkan dengan targetnya yaitu 4,14% (Pemprov Jawa Barat, 2024). Angka tersebut menempati posisi tertinggi kedua di Pulau Jawa dan tertinggi ke-12 pada level nasional. Beberapa sektor yang memiliki kontribusi peningkatan tertinggi yaitu industri makanan dan minuman serta industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman. Terdapat beberapa kunci yang menjadi faktor keberhasilan antara lain meningkatnya kualitas perencanaan industri telah terjalinnya kemitraan dan manajemen sumber daya manusia industri, didukung oleh kualitas pengendalian industri yang semakin membaik, serta peningkatan kualitas layanan industri kecil menengah, pangan olahan, dan kemasan (Pemprov Jawa Barat, 2024). Berdasarkan kondisi di atas,

tidak ada kendala signifikan yang menghambat pengembangan sektor industri pengolahan di Jawa Barat. Kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat maupun sektor swasta terkait pengembangan industri perlu dipertahankan secara konsisten dan berkelanjutan.

- Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
Berdasarkan indeks penggunaan air, Jawa Barat pada tahun 2023 memiliki realisasi nilai 1,18 yang melebihi target yaitu 1,17 (Pemprov Jawa Barat, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan air yang dibutuhkan relatif terpenuhi oleh suplai yang ada. Beberapa faktor pendukung keberhasilan dari terpenuhinya kebutuhan air tersebut antara lain ketersediaan air permukaan yang mencukupi; adanya tampungan air dengan kapasitas yang cukup; sungai pada wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yang ternormalisasi; pemantauan dan pemeliharaan situ, danau, embung dan waduk; serta adanya kesepakatan pembangunan bendungan proyek strategis nasional (Pemprov Jawa Barat, 2024). Meski kinerja pemenuhan air baku sudah cukup baik, namun kinerja akses air minum layak masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal tersebut ditunjukkan dari jumlah populasi dengan akses terhadap sumber air minum layak dibagi jumlah populasi memiliki capaian sebesar 95,42% dengan target 98,37% sedangkan realisasinya sebesar 93,86% (Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, 2024). Beberapa kendala yang dihadapi pemenuhan akses air minum antara lain sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal serta belum semua pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan dan rencana pemenuhan kebutuhan air minum (Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, 2024).

Dalam sektor ini, akses terhadap penanganan sampah di Perkotaan juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk terlayani penanganan sampah dibagi total jumlah penduduk. Dari target sebesar 79%, realisasi dari indikator tersebut yaitu 74,64% atau memiliki capaian sebesar 94,48% (Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, 2024). Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain masih adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarang yang disebabkan oleh kesadaran yang rendah dalam mengurangi dan memilah sampah atau melakukan Reuse, Reduce dan Recycle (3R); belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu pada Tempat Pembuangan Sementara/TPS, Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, dan pengangkutan); serta pengelolaan persampahan berorientasi 3R yang belum efektif dan terpadu (Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, 2024). Selain menggunakan pendekatan infrastruktur, pendekatan humanis bisa dilakukan untuk memperbaiki perilaku membuang sampah tersebut agar sampah tidak langsung dibuang pada TPA melainkan dilakukan pemilahan terlebih dahulu.

- Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
Pada sektor ini, Jawa Barat telah memasukkan ke dalam Rencana Strategis yaitu Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang

mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan. Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran tersebut ialah dengan menggunakan Skor Pola Pangan Harapan dan Nilai Tukar Petani. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) mengacu pada susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor tersebut digunakan sebagai instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. PPH juga berfungsi sebagai acuan dalam menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Nilai SPPH pada tahun 2023 terealisasi sebesar 93,8 dari target 92,8 (Pemprov Jawa Barat, 2024). Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian tersebut disebabkan karena terpenuhinya tingkat cadangan pangan pemerintah daerah, dilakukannya Gelar Pangan Murah melalui fasilitasi distribusi 11 pangan strategis, peningkatan keamanan pangan sesuai standar mutu, serta sosialisasi dan bimtek dengan topik pertanian terkait (Pemprov Jawa Barat, 2024). Selain dari sisi output, sisi input merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting. Nilai Tukar Petani Jawa Barat pada tahun 2023 terealisasi sebesar 107,45 dari target 104,52 (Pemprov Jawa Barat, 2024). Angka tersebut menunjukkan bahwa petani memiliki pemasukan lebih tinggi dibanding pengeluarannya. Dalam prosesnya, terdapat beberapa tantangan pada sektor pertanian antara lain masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas pertanian dari hulu ke hilir, rendahnya regenerasi petani serta menurunnya luas lahan pertanian (Dinas Pertanian dan Hortikultura Jawa Barat, 2024).

- Sektor penyediaan makan dan minum
Sektor penyediaan makan minum berkaitan dengan industri makanan minuman serta produksi makan dan minum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Beberapa kunci sukses dari sektor ini yaitu pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program UMKM Juara dan pemberian pelatihan dan pendampingan; penyelenggaraan festival kuliner dan promosi wisata; digitalisasi dan ekonomi kreatif; serta pengembangan industri pariwisata berbasis kuliner. Mengingat permintaan yang cukup tinggi, pada sektor ini konsumsi masyarakat menjadi kunci sehingga mempertahankan daya beli masyarakat merupakan salah satu poin penting untuk menjaga konsumsi pada tingkat yang diharapkan.
- Sektor informasi dan komunikasi
Sektor informasi dan komunikasi di Jawa Barat menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dari indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 4,14 yang termasuk dalam kategori sangat baik dari target 3,7 (Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, 2024). Selain itu, indeks keterbukaan informasi publik di Jawa Barat berada pada posisi ke-4 nasional dengan nilai 95,53 (Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, 2024). Meskipun tidak sampai memenuhi target yang direncanakan, namun capaian tersebut perlu untuk diapresiasi. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan sektor informasi dan komunikasi di Jawa Barat antara lain belum

optimalnya pengadaan barang dan jasa di Dinas Komunikasi dan Informatika serta belum terpenuhinya standar permohonan informasi yang ada pada sektor PPID pelaksana (Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, 2024).

- Sektor real estat

Perkembangan kinerja sektor real estat terus berkembang termasuk di Jawa Barat. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan permukiman (2024), capaian kinerja melalui indikator rasio permukiman layak dan tingkat ketersediaan rumah layak menunjukkan capaian di atas 100% yang berarti realisasi yang dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam sektor ini antara lain penyediaan tanah untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terkendala mahalannya harga lahan, lokasi yang jauh, serta pembangunan perumahan yang belum sejalan dengan rencana pembangunan perkotaan sesuai rencana tata ruang wilayah (Dinas Perumahan dan permukiman, 2024).

- Sektor jasa pendidikan

Berdasarkan sektor jasa pendidikan, kinerja pembangunan dapat dilihat menggunakan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/SMK/SMLB serta nilai mutu pendidikan pada jenjang SMA/SMK/SMLB (Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2023). Pada tahun 2022, nilai APM SMA/SMK/SMLB ialah 83,68 yang mana masuk kategori sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, nilai mutu pendidikan pada jenjang SLB memiliki kriteria sangat baik sedangkan pada jenjang SMA dan SMK memiliki kriteria baik (Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2023). Meskipun memiliki kinerja yang baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan antara lain belum meratanya distribusi guru antar daerah, masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, nilai rata-rata uji kompetensi guru yang relatif rendah, belum sinergisnya tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan menengah dan daya saing pendidikan.

Dari ketujuh sektor di atas, beberapa koridor dalam rangka mengoptimalkan daya saing Jawa Barat perlu diterapkan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan perencanaan, implementasi hingga pengendalian dan evaluasi. Proses tersebut dapat diawali melalui penyusunan regulasi yang berkualitas. Aspek penyusunan regulasi menjadi krusial dalam mempengaruhi kemudahan berbisnis dan daya saing ekonomi suatu wilayah sesuai dengan temuan World Bank (2017). Regulasi menjadi penting sebagai bagian dari institusi dan memiliki peran penting dalam membentuk daya saing ekonomi (North, 1991). Hal tersebut juga diperkuat oleh temuan OECD (2015) bahwa kebijakan regulasi yang baik juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Selain dari aspek perencanaan melalui regulasi yang berkualitas, implementasi yang baik juga tidak kalah penting. Implementasi yang dilakukan harus menerapkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Hal tersebut sejalan dengan temuan Acemoglu dan Robinson (2012) bahwa tata kelola merupakan bagian dari tata

kelola yang menjadi kunci keberhasilan ekonomi dan daya saing suatu wilayah. Dalam laporan daya saing global tahun 2020, juga dijelaskan bahwa tata kelola dan institusi yang kuat memiliki peran penting untuk menjadi penentu dalam daya saing suatu negara atau wilayah (World Economic Forum, 2020).

Agar kebijakan yang diterapkan dapat berhasil dan berkelanjutan sistem pemberian insentif dan disinsentif relevan untuk diberlakukan. Hal tersebut sejalan dengan temuan Rodrik (2004) serta Benabou dan Tirole (2003) bahwa kebijakan insentif produksi yang efektif serta kombinasi insentif intrinsik dan ekstrinsik dapat digunakan untuk mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing di berbagai wilayah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terdapat 4 (empat) sektor yang mendukung perekonomian wilayah Jawa Barat pada rentang tahun 2018 – 2022 yang ditunjukkan dari nilai LQ antara lain sektor industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; serta jasa lainnya. Hal tersebut didukung oleh hadirnya berbagai jenis industri (tekstil, otomotif, elektronik hingga makanan dan minuman) serta masuk sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia. Mengingat kontribusinya yang cukup signifikan, dukungan kebijakan dalam pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pemberian kemudahan berusaha melalui sistem insentif yang diberikan serta pemantapan infrastruktur pendukung seperti jalan menjadi penting untuk diprioritaskan. Jika dilihat berdasarkan analisis DLQ, terdapat 7 (tujuh) sektor prospektif yang mendominasi perekonomian di Jawa Barat pada rentang tahun 2018 – 2022 antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estat; serta jasa pendidikan. Banyaknya sektor prospektif yang dimiliki Jawa Barat menunjukkan bahwa masih banyak sektor yang potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan tipologi Klassen, pemerintah dapat berfokus dalam mengembangkan sektor pembangunan yang tergolong sektor basis dan sektor potensial. Terdapat 7 (tujuh) sektor yang masuk ke dalam dua kategori tersebut dan prioritas untuk dikembangkan yaitu sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estat; serta jasa pendidikan.

Kinerja sektor industri menunjukkan hasil yang baik dengan realisasi laju pertumbuhan sektor industri yaitu 4,74% yang didukung oleh industri makanan dan minuman serta industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman. Sektor industri pengolahan tidak memiliki kendala signifikan dalam praktiknya di lapangan. Pemerintah perlu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat maupun sektor swasta terkait pengembangan industri agar dapat bertahan secara konsisten dan berkelanjutan. Pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, capaian kinerja ketersediaan air baku tergolong baik namun kinerja akses air

minum layak masih perlu menjadi perhatian karena belum memenuhi target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi pemenuhan akses air minum antara lain sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal serta belum semua pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan dan rencana pemenuhan kebutuhan air minum. Permasalahan lain dalam sektor ini juga terkait dengan persampahan. Indikator kinerja jumlah penduduk terlayani penanganan sampah dibagi total jumlah penduduk tidak dapat memenuhi target yang disebabkan oleh masih adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarang yang disebabkan oleh kesadaran yang rendah dalam mengurangi dan memilah sampah atau melakukan Reuse, Reduce dan Recycle (3R); belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu pada Tempat Pembuangan Sementara/TPS, Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, dan pengangkutan); serta pengelolaan persampahan berorientasi 3R yang belum efektif dan terpadu. Pada sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, kinerja pembangunan dapat dilihat menggunakan Skor Pola Pangan Harapan dan Nilai Tukar Petani yang tergolong baik karena memiliki realisasi melebihi target yang ditetapkan. Dalam prosesnya, terdapat beberapa tantangan pada sektor ini antara lain masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas pertanian dari hulu ke hilir, serta menurunnya luas lahan pertanian. Pada sektor penyediaan makan dan minum, memiliki kinerja yang baik karena didukung oleh ekosistem UMKM dan event ekonomi kreatif yang sering diselenggarakan. Meskipun demikian, mempertahankan daya beli masyarakat merupakan salah satu poin penting untuk menjaga konsumsi pada tingkat yang diharapkan. Pada sektor informasi dan komunikasi, kinerja.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sudah menunjukkan nilai yang sangat baik meskipun indeks keterbukaan informasi publik masih belum dapat memenuhi target. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain belum optimalnya pengadaan barang dan jasa di Dinas Komunikasi dan Informatika serta belum terpenuhinya standar permohonan informasi yang ada pada sektor PPID pelaksana. Pada sektor real estat, terus mengalami perkembangan yang ditunjukkan oleh capaian kinerja melalui indikator rasio permukiman layak dan tingkat ketersediaan rumah layak menunjukkan capaian di atas 100%. Kendala yang ada dalam sektor ini antara lain penyediaan tanah untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terkendala mahalannya harga lahan, lokasi yang jauh, serta pembangunan perumahan yang belum sejalan dengan rencana pembangunan perkotaan sesuai rencana tata ruang wilayah. Terakhir pada sektor jasa pendidikan, kinerja pembangunan dapat dilihat menggunakan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/SMK/SMLB serta nilai mutu pendidikan pada jenjang SMA/SMK/SMLB secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan antara lain belum meratanya distribusi guru antar daerah, masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, nilai rata-rata uji kompetensi guru yang relatif rendah, belum sinergisnya tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan menengah dan daya saing pendidikan.

V. REKOMENDASI

Berikut merupakan rekomendasi yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan daya saing wilayah Jawa Barat beserta aktor-aktor penting yang terlibat di dalamnya:

- a. Melakukan penyelarasan perencanaan dan pengembangan sektor yang prospektif agar selaras dengan perencanaan pembangunan nasional

Dalam dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, tema pembangunan di Jawa Barat ialah pusat cutting-edge industry, inovasi dan pendidikan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics) bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Dalam melakukan penyelarasan tersebut, dibutuhkan kolaborasi yang harmonis antara Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Barat serta Perangkat Daerah Teknis terkait khususnya dalam menyepakati arah kebijakan, sasaran strategis beserta target indikator program maupun kegiatan yang ada di dalamnya. Berdasarkan tema pembangunan di atas dan sektor prospektif yang telah dipetakan menggunakan tipologi Klassen, arah kebijakan strategis dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

- Menjadi Pusat Cutting-Edge Industry

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peta jalan yang jelas sebagai langkah awal. Peta jalan tersebut dapat digunakan sebagai panduan dalam strategi pengembangan pusat cutting-edge industry berdasarkan pentahapannya. Selain itu, pengembangan industri lainnya juga perlu terus didorong seperti melalui pengembangan kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang & Kertajati-Cirebon (industri hi-tech, industri kimia, industri logam & bahan galian, industri elektronik & optik, industri mesin, industri otomotif & alat angkutan, industri migas, industri pertahanan & keamanan, industri furnitur, industri aneka). Meskipun beberapa industri besar merupakan industri nasional, pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator serta secara aktif mendorong kerjasama agar terbentuk ekosistem industri yang saling mendukung baik melalui pemberian bimbingan teknis kepada sektor yang sama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik dalam bentuk pemberdayaan atau bantuan, maupun pemberian kemudahan dalam menjalankan usaha seperti dalam bentuk pemotongan pajak tertentu. Beberapa instansi yang terkait dalam suksesi tujuan ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

- Penguatan Inovasi dan Pendidikan STEAM bertaraf global

Arah kebijakan untuk mendukung tujuan di atas dapat dilakukan dengan menggali inovasi terkait sektor pengadaan air dan persampahan serta mendongkrak pendidikan STEAM di Jawa Barat melalui pilot project. Dalam rangka mengatasi masalah pengadaan air khususnya pada pemenuhan akses air minum, pemerintah daerah dapat berfokus pada infrastruktur pendukung seperti jalan agar pendistribusiannya tidak mengalami kendala yang berarti. Selain itu, kabupaten dan kota perlu untuk menyusun rencana pemenuhan

kebutuhan air minum sehingga meskipun tidak bisa diadakan secara mandiri oleh wilayahnya, kebutuhan akan akses air minum dapat terpenuhi dengan terjaganya distribusi dari wilayah lain. Tidak hanya itu, inovasi di bidang pengelolaan sampah juga menjadi penting mengingat adanya kondisi overcapacity atas tempat pembuangan akhir yang tersedia. Inovasi yang diharapkan tidak harus terkait dengan kebutuhan akan teknologi yang biasanya mengarah pada kebutuhan pendanaan yang besar namun juga perlu didorong perubahan perilaku masyarakat untuk dapat membatasi sampah yang diproduksi melalui gerakan ekonomi sirkular. Hal tersebut membutuhkan sentuhan pendekatan humanistik melalui aktor penting lokal agar dapat berhasil dan terus berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat menerapkan "1 desa, 1 duta sampah" yang memiliki fungsi untuk mengawal gerakan ekonomi sirkular di wilayahnya. Hal tersebut dilakukan dengan menunjuk warga setempat yang memiliki concern terhadap isu lingkungan khususnya sampah serta diperkuat dengan jejaring dan influence yang memadai. Beberapa instansi perangkat daerah yang dapat dilibatkan dalam mencapai tujuan tersebut antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Selain itu, untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan bertaraf global, piloting dapat dilakukan di beberapa kampus terbaik seperti di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjajaran. Pendidikan tinggi juga dapat melakukan serta menjalin kerjasama riset kolaboratif terapan dengan perangkat daerah teknis agar riset yang dilakukan dapat terimplementasi atau terdiseminasi dengan baik. Instansi pemerintah daerah juga harus turut berkontribusi terhadap perbaikan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah melalui mutasi penempatan guru dari wilayah yang memiliki surplus guru ke wilayah yang lebih sedikit jumlah gurunya untuk menjamin pemerataan distribusi guru antar daerah, memberikan bimbingan teknis terkait pemenuhan syarat dan ketentuan agar dapat terakreditasi dengan baik, pemberian pelatihan sebelum guru melakukan uji kompetensi, melakukan reformulasi kebijakan terkait tata kelola pembagian wewenang level provinsi dan kabupaten/kota serta meningkatkan partisipasi pendidikan dengan pemberian beasiswa ataupun bantuan yang tepat sasaran. Beberapa instansi yang terlibat dalam pencapaian tujuan Dinas Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

- **Menjadi Penunpku Ketahanan Pangan Nasional**
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perhatian khusus mengenai sektor pangan unggulan yang diproduksi di Jawa Barat. Pengembangan kawasan strategis agrikultur Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy perlu didorong melalui pengembangan irigasi di WS Ciwulan-Cilaki. Tidak hanya itu, dalam rangka mengatasi pembangunan sektor non pertanian yang tinggi serta luas lahan pertanian yang terus-menerus mengalami penurunan, pemerintah perlu melakukan pembatasan. Pemerintah daerah dapat

menerapkan zona lahan pertanian permanen yang pemanfaatannya tidak boleh dialihkan menjadi non pertanian seperti yang sudah dilakukan di Perancis (Bureau of European Policy Advisors, 2011). Selain itu, dapat dilakukan pertanian vertikal dengan memanfaatkan bangunan tinggi dan akuaponik seperti yang dilakukan di China (FAO, 2019). Insentif dalam bentuk pengurangan pajak serta pemberian subsidi kepada petani juga bisa menjadi alternatif yang baik untuk mempertahankan lahan pertanian (Kato, 2014). Hal tersebut sudah dilakukan Jepang untuk mengkompensasi terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Beberapa aktor yang dapat dilibatkan dalam mencapai tujuan ini antara lain Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Meskipun hanya terdapat 4 sektor yang relevan dengan perencanaan pembangunan tematik nasional di Jawa Barat, 2 sektor lain tetap dapat dikembangkan dengan rekomendasi sebagai berikut:

- Pada sektor real estat, perkembangan yang terus terjadi namun dibatasi oleh ketersediaan lahan dan harga lahan yang mahal dapat diatasi dengan pembangunan vertikal. Hal tersebut telah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Hongkong yang merupakan kota dengan lahan paling terbatas di dunia (Yeh & Tang, 2016). Subsidi dan insentif kepada pengembang juga dapat diberikan dalam bentuk pengurangan pajak dan subsidi lahan seperti yang dilakukan di Singapura (Phang, 2018). Meskipun demikian, pemerintah daerah perlu secara serius dan tegas untuk melakukan zonasi khusus untuk program perumahan agar keseimbangan tata ruang dapat tetap terjaga dan tidak ada alih fungsi lahan khususnya pada lahan pertanian yang memiliki dampak terhadap ketahanan pangan. Beberapa aktor yang terkait dalam hal ini antara lain Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Pada sektor informasi dan komunikasi, rekomendasi yang dapat dijalankan yaitu memulai dan mendorong pengadaan barang dan jasa di Dinas Komunikasi dan Informatika dan dinas lainnya secara elektronik demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, melakukan penyusunan standar dan implementasi permohonan informasi publik serta berupaya untuk mengatasi wilayah-wilayah yang belum memiliki akses terhadap internet khususnya di wilayah dengan letak geografis yang tidak memungkinkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama dengan swasta baik dalam bentuk pemberian bantuan akses internet ataupun dalam bentuk corporate social responsibility.
- Pada sektor akomodasi dan makan minum, adanya penduduk dengan jumlah yang sangat besar menyebabkan permintaan akomodasi dan makan minum permintaannya relatif tinggi. Pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan ialah

mempertahankan daya beli masyarakat untuk menjaga konsumsi pada tingkat yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan evaluasi terhadap kondisi fundamental ekonomi wilayah. Kerjasama dengan stakholder lain menjadi penting dilakukan seperti dengan Bank Indonesia Jawa Barat dalam rangka pengendalian terhadap komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi daerah.

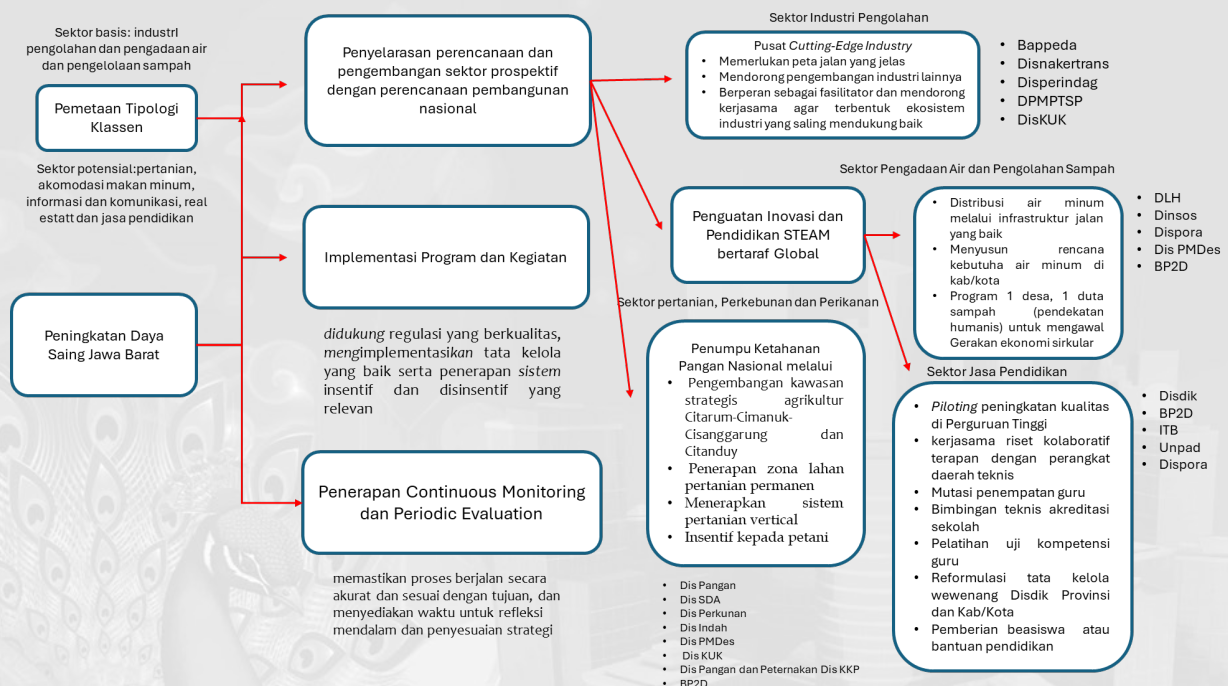
b. Implementasi Program dan Kegiatan

Arah kebijakan berbasis daya saing di atas, tidak dapat dipungkiri memerlukan kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan yang lainnya. Hal tersebut dapat didukung dengan adanya penyusunan dan perumusan regulasi yang berkualitas (bersifat komprehensif dan tidak egosektoral), mengimplementasikan tata kelola yang baik serta penerapan sistem insentif dan disinsentif yang relevan atas tujuan dan arah kebijakan yang akan diterapkan.

c. Penerapan Continous Monitoring dan Periodic Evaluation

Penerapan Continous Monitoring dan Periodic Evaluation secara terintegrasi dalam manajemen pembangunan memberikan pendekatan yang lebih komprehensif. Adanya continuous monitoring memastikan proses berjalan secara akurat dan sesuai dengan tujuan, sedangkan periodic evaluation menyediakan waktu untuk refleksi mendalam dan penyesuaian strategi. Kombinasi ini memperkuat sistem kontrol manajemen dan memungkinkan perbaikan yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan.

Secara ringkas, berikut merupakan bagan mengenai rekomendasi dari hasil paper ini:



Sumber : Diolah Penulis dari Berbagai Sumber

REFERENSI

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. *The Journal of Economic Literature*, 50(2), 496-528.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/04/13/d5ce181590472cea3abbb80c/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-lapangan-usaha-2018-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2022. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YjJOWGNERmxhMUV5UKdoeFIwSXJjRUoOZERGalVUMDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-miliar-rupiah.html?year=2022>
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2024). [Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat (Milyar Rupiah), 2018-2022. <https://jabar.bps.go.id/indicator/52/111/1/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-provinsi-jawa-barat.html>
- Basuki, Mahmud & Mujiraharjo. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. 15. 52-60.
- Bénabou, R., & Tirole, J. (2003). Intrinsic and Extrinsic Motivation. *The Review of Economic Studies*, 70(3), 489-520.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. https://file.jabarprov.go.id/webdiskom/media/docs/informasi/LKIP_DISKOMINFO_2023_05042024_070735_signed.pdf
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. https://api.webdisdik.jabarprov.go.id/storage/disdik_web/assets/ppid/LKIP_DISDIK_2022_Rev_Akhir10_Juli_23_09082023_113105_signed.pdf
- Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
- Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. <https://disperkim.jabarprov.go.id/storage/informasis/17240347016LeAHB1P.pdf>
- FAO. (2019). *Urban Agriculture in China: Emerging Innovations for Food Security*. Food and Agriculture Organization.
- Kato, H. (2014). Agricultural and Policies in Japan and Their Impact on Land Conservation. *Journal of Rural Development*, 33(2), 125-140.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2019). *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2023). *Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025 - 2029*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kurniati, N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Perekonomian Wilayah Kota Mataram. *Media Bina Ilmiah*, 15(1), 3799-3806.
- North, D. C. (1991). Institutions. *The Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97-112.
- Nugroho, A. D. (2010). Komoditas Unggulan Tanaman Pangan di Pulau Jawa. *Agro Ekonomi*, 17(1), 67-72.
- OECD. (2015). *Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest*. Paris: OECD Publishing.
- Phang, S. Y. (2018). *Policy Innovations for Affordable Housing in Singapore: From Colony to Global City*. Palgrave Macmillan.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa

- Barat Tahun 2023. <https://file.jabarprov.go.id/live/media/docs/archives/1721201147-27.-Informasi-Laporan-Akuntabilitas-dan-Kinerja-Tahunan-Pemerintah-Daerah-Tahun-2023.pdf>
- Rodrik, D. (2004). Industrial Policy for the Twenty-First Century. CEPR Discussion Papers, No. 4767.
- Schaffer, W. a. (2010). Regional Models of Income Determination: Simple Economic-Base Theory. In Economic Base Theory (p. 42).
- Soepono, P. (2001). Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi: Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-Alat Analisis Regional. *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 16(1), 41-53.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches*. SAGE Publications.
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- World Bank. (2017). *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All*. Washington, DC: World Bank.
- World Economic Forum. (2020). *The Global Competitiveness Report 2020*. Geneva: World Economic Forum.
- Yeh, A. G., & Tang, B. S. (2016). *High-Density Living in Hong Kong: The Context and Implications*. University of Hong Kong Press.
- Yuwono, P. (1999). Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, *Kritis*, Vol. XII.